

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan adanya perkembangan dan peningkatan perekonomian suatu wilayah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan hubungan yang erat, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama dari beberapa syarat yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu, menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, 2005). Dalam konteks otonomi daerah, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah desentralisasi fiskal.

Sebagian besar ekonom percaya bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki pemerataan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat dan sebagian lain berpandangan sebaliknya (Saputra & Mahmudi, 2012). Penelitian Amagoh & Ajab Amin (2012) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal yang efektif dipengaruhi oleh kerangka kelembagaan yang bersifat komprehensif sehingga kebijakan desentralisasi fiskal menghasilkan manfaat tambahan bagi akuntabilitas, pendapatan, dan otonomi politik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian tersebut menyimpulkan

bahwa dalam literatur teoritis lebih condong mendukung hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Kewenangan desentralisasi fiskal diharapkan layanan kepada masyarakat akan semakin efisien dan ujungnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian Zhang, T., & Zou (2001) juga menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di India. Desentralisasi dipandang sebagai suatu langkah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, Martinez & McNab (2001) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Desentralisasi fiskal dapat mendorong ke arah ketidakstabilan ekonomi makro yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kasus di negara-negara berkembang. Hal ini juga konsisten dengan penelitian di Indonesia oleh Jumadi, Maski, & Khusaini (2013) dan Saputra & Mahmudi (2012) yang menunjukkan pengaruh ke arah negatif. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah melakukan pengeluaran atau belanja daerah. Sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan sektoran suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PDRB atas dasar harga konstan 2010 yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Di provinsi Jawa Timur PDRB kabupaten/kota masih mengalami kesenjangan antara kota satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan masih terpusatnya kegiatan perekonomian di Jawa Timur. Robinson Tarigan (2005), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*add value*), yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan ini diukur dalam nilai riil (dinyatakan dalam harga konstan).

Tabel. 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten/Kota Pada Provinsi Jawa Timur (2011-2018) dalam persen

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Kab/Kota
Pacitan	6,29	6,33	5,87	5,21	5,1	5,21	4,98	5,51	5,56
Ponorogo	5,7	5,98	5,14	5,21	5,25	5,29	5,1	5,31	5,37
Trenggalek	5,94	6,21	6	5,28	5,03	5	5,02	5,03	5,44
Tulungagung	6,37	6,47	6,13	5,46	4,99	5,02	5,08	5,21	5,59
Blitar	5,43	5,62	5,06	5,02	5,06	5,08	5,07	5,1	5,18
Kediri	6,03	6,11	5,82	5,32	4,88	5,02	4,9	5,08	5,40
Malang	6,65	6,77	5,3	6,01	5,27	5,3	5,43	5,56	5,79
Lumajang	6,2	6	5,58	5,32	4,62	4,7	5,05	5,02	5,31
Jember	5,49	5,83	6,06	6,21	5,36	5,23	5,11	5,23	5,57
Banyuwangi	6,95	7,24	6,71	5,72	6,01	5,38	5,45	5,84	6,16
Bondowoso	6,07	6,09	5,81	5,05	4,95	4,97	5,03	5,09	5,38
Situbondo	5,38	5,43	6,19	5,79	4,86	5	5,07	5,43	5,39
Probolinggo	5,88	6,44	5,15	4,9	4,76	4,77	4,46	4,47	5,10
Pasuruan	6,69	7,5	6,95	6,74	5,38	5,44	5,72	5,79	6,28
Sidoarjo	7,04	7,26	6,89	6,44	5,24	5,51	5,8	6,05	6,28
Mojokerto	6,61	7,26	6,89	6,45	5,65	5,49	5,74	5,85	6,24
Jombang	5,96	6,15	5,93	5,42	5,36	5,4	5,36	5,43	5,63

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Kab/Kota
Nganjuk	5,75	5,85	5,4	5,1	5,18	5,29	5,26	5,39	5,40
Madiun	6,02	6,12	5,67	5,34	5,26	5,27	5,42	5,1	5,53
Magetan	5,64	5,79	5,85	5,1	5,17	5,31	5,09	5,25	5,40
Ngawi	6,11	6,63	5,5	5,82	5,08	5,21	5,07	5,26	5,59
Bojonegoro	10,39	3,77	2,37	2,29	17,42	21,95	10,26	4,41	9,11
Tuban	6,84	6,29	5,85	5,47	4,89	4,9	5	5,16	5,55
Lamongan	6,67	6,92	6,93	6,3	5,77	5,86	5,52	5,5	6,18
Gresik	6,48	6,92	6,93	7,04	6,61	5,49	5,83	5,97	6,41
Bangkalan	3,31	1,42	0,19	7,19	-2,66	0,66	3,53	4,26	1,88
Sampang	2,5	5,77	6,53	0,08	2,08	6,17	4,69	4,51	4,04
Pamekasan	6,22	6,25	6,1	5,62	5,32	5,35	5,04	5,46	5,67
Sumenep	6,13	9,96	14,45	6,23	1,27	2,58	2,86	3,58	5,88
Kota Kediri	4,29	5,27	3,52	5,85	5,36	5,54	5,14	5,42	5,05
Kota Blitar	6,43	6,52	6,5	5,88	5,68	5,76	5,78	5,83	6,05
Kota Malang	6,04	6,26	6,2	5,8	5,61	5,61	5,69	5,72	5,87
Kota Probolinggo	5,95	6,49	6,47	5,93	5,88	5,88	5,88	5,94	6,05
Kota Pasuruan	6,28	6,31	6,51	5,7	5,46	5,46	5,47	5,54	5,84
Kota Mojokerto	5,97	6,09	6,2	5,83	5,77	5,77	5,65	5,8	5,89
Kota Madiun	6,79	6,83	7,68	6,62	5,9	5,9	5,63	5,96	6,41
Kota Surabaya	7,13	7,35	7,58	6,96	6	6	6,13	6,2	6,67
Kota Batu	7,13	7,26	7,29	6,9	6,61	6,61	6,56	6,5	6,86

Sumber: BPS, Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota yang memiliki PDRB yang bervariasi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, hal ini dapat dilihat dari PDRB Harga Konstan menurut kab/kota. Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Kabupaten Bojonegoro dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,11 persen. Kemudian di urutan kedua yaitu terjadi pada daerah Kota Batu dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,86 persen. Kemudian, untuk pertumbuhan

ekonomi yang paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan yaitu sebesar 1,88 persen.

Hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi sebesar 10,39 persen kemudian di tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun ditahun berikutnya, yaitu tahun 2015 bangkit kembali dan pertumbuhan ekonomi menjadi 17,42 persen dan terus meningkat di tahun 2016 menjadi sebesar 21,95 persen. Namun ditahun 2017 dan 2018 kembali mengalami penurunan. Berbeda halnya dengan Kabupaten Bangkalan. Pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut mencapai nilai negatif. Walaupun secara tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan sebesar 3,31 persen kemudian turun ditahun berikutnya yaitu menjadi sebesar -1,42 persen. Kemudian di tahun 2013 mulai meningkat sedikit menjadi 0,19 persen dan naik cukup signifikan di tahun 2014 menjadi 7,19 persen. Namun setelah mengalami kenaikan yang cukup banyak justru di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu menjadi -2,66 persen. Dan di tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan mulai meningkat secara perlahan sampai di tahun 2018.

Faktor-faktor yang menyebabkan bervariasinya Pendapatan Regional Bruto Daerah di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur juga

cukup bervariasi, antara lain pengembangan sektoral yang berbeda antar daerah, jumlah penduduk dan tenaga kerja yang berbeda antar daerah, sumber-sumber penerimaan yang berbeda antar daerah, dan lain sebagainya.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Kekayaan alam yang melimpah perlu didukung dengan kegiatan investasi. Sebab, investasi berguna untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi yang kemudian dapat menambah barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi untuk digunakan di masa mendatang. Penanaman modal atau investasi di daerah memegang dua macam fungsi yaitu menciptakan permintaan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat, serta menambah permintaan masyarakat, penanaman modal akan menciptakan pendapatan daerah beberapa kali lipat dari besarnya penanaman modal itu sendiri. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Defi Erli (2018) bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri dan PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penanaman modal di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang berasal dari pemerintah/swasta di dalam negeri dan PMA (Penanaman Modal Asing) yang berasal dari pihak luar negeri. Dengan adanya penanaman modal akan meningkatkan kapasitas produksi yang kemudian meningkatkan output dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mampu membuka lapangan kerja baru dan mampu memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahterannya.

Selain investasi, faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika tenaga kerja tersebut dapat diserap dengan baik di lapangan pekerjaan. Sebaliknya, jika besarnya jumlah tenaga kerja tidak dapat diserap dengan baik di lapangan pekerjaan, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan pengangguran. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilakukan dengan pendidikan. Dengan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas akan menambah angkatan kerja yang bekerja dan dapat mengurangi munculnya masalah baru yaitu pengangguran.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Pulau Jawa. Daerah ini dikelilingi oleh lautan sehingga kaya akan hasil laut, memiliki kandungan minyak dan gas serta sumber-sumber mineral (batu kapur, semen, emas). Selain itu, kekayaan alam yang melimpah merupakan potensi untuk menjadikannya sebagai daerah maju. Perlu adanya penanaman modal sehingga sumber daya alam tersebut dapat dikelola dengan baik. Yang paling penting adalah kualitas tenaga kerja, kebijakan pemerintah yang mendukung maka pertumbuhan ekonomi terutama di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur akan tercapai dengan maksimal.

Desentralisasi fiskal, investasi, tenaga kerja dan laju pertumbuhan penduduk menjadi suatu hal yang penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik,

pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi yang terdiri dari tiga unsur pokok antara lain ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan sumber daya insani dan stok modal (Sukirno, 2011). Ketiga unsur pokok tersebut mewakili beberapa unsur yang dimiliki daerah.

Kerisauan terhadap dampak ekonomi global, dan pengaruh ekonomi negeri China akibat wabah penyakit Corona di Indonesia kini terjadi. Namun jauh sebelumnya, Presiden sudah mengantisipasi dampak ekonomi global mulai di daerah-daerah. Termasuk terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari Presiden dengan menerbitkan Peraturan Presiden No 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Dengan terbitnya Perpres itu, seolah Presiden sudah *weruh sakdurunge winarah*, tahu sebelum apa yang akan terjadi dengan berbagai petunjuk fenomena ekonomi dunia dan tanda-tanda alam. Perpres menjadi jawaban atas situasi ekonomi yang membelit berbagai dunia.

Boleh jadi Perpres strategi mengatasi kondisi ekonomi hingga ke daerah, bukan hanya dari kaca mata nasional dan internasional. Perpres membangkitkan dan memberi ‘doping’ semangat para pelaku usaha untuk lebih makin optimis menghadapi tantangan dan hambatan akibat situasi ekonomi dunia. (Faktualnews.co, 27/02, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui dampak dari adanya desentralisasi fiskal, tenaga kerja, investasi, dan laju pertumbuhan

penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2011-2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di (kabupaten/kota) di Jawa Timur pada periode 2011-2018?
2. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (kabupaten/kota) di Provinsi Jawa Timur pada periode 2011-2018?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada periode 2011-2018?
4. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur periode 2011-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Jawa Timur pada periode 2011-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Jawa Timur pada periode 2011-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada periode 2011-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada periode 2011-2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis, dimana penelitian diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi bagi pembaca yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi fiskal bagi daerah. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara merata keseluruhan tanpa adanya ketimpangan.
2. Manfaat teoritis, dimana penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membuktikan secara empiris hubungan antara variabel yang akan diuji yaitu pertumbuhan ekonomi dengan indikator pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita dan urbanisasi.
3. Manfaat lainnya, dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Metode Penelitian

E.1 Alat dan Model Analisis

Penelitian ini akan mengamati pengaruh variabel tenaga kerja, desentralisasi fiskal, investasi, laju pertumbuhan terhadap pertumbuhan ekonomi di (kabupaten/kota) di Jawa Timur menggunakan alat analisis regresi data panel, yang formulasi model estimatornya adalah:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 TK_{it} + \beta_2 DF_{it} + \beta_3 INV_{it} + \beta_4 LPP_{it} + e_{it}$$

Dimana:

PE	: Pertumbuhan Ekonomi
TK	: Tenaga Kerja
DF	: Desentralisasi Fiskal Daerah
INV	: Investasi
LPP	: Laju Pertumbuhan Penduduk
i	: <i>Cross Section</i>
t	: <i>Time Series</i>
β_0	: Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_4$	: Koefisien Regresi
e	: <i>error term</i>

Sumber: Replikasi dan Pengembangan dari Agung Dinarjito (2020) dengan judul “*Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur*”, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. Vol 2, No 1. Chairul Nizar (2013) dengan judul “*Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Ekonomi. ISSN 2302-0172.

E.2 Data dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yaitu berupa data *cross section* 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan runtun waktu (*time series*) dari tahun 2011-2018 yang terdiri dari tenaga kerja, rasio derajat desentralisasi fiskal, investasi, laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kemenkeu, BKPM.

F. Sistematika Pembahasan

Berikut merupakan sistematika penyusunan penulisan skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka tentang landasan teori, penelitian sebelumnya dan hipotesis terkait dengan skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data serta analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi data penelitian, hasil analisis data, dan interpretasi ekonomi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN